

**IDENTIFIKASI PERAN *STAKEHOLDER* DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH 3R DI KABUPATEN BEKASI**

JURNAL TUGAS AKHIR

**KARLINA
11319015**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Teknik
Pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK DAN DESAIN
INSTITUT TEKNOLOGI SAINS BANDUNG
BEKASI
FEBRUARI 2024**

LEMBAR PENGESAHAN

**IDENTIFIKASI PERAN *STAKEHOLDER* DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH 3R DI KABUPATEN BEKASI**

JURNAL TUGAS AKHIR

**KARLINA
11319015**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Teknik
Pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

Menyetujui,
Bekasi, 26 Februari 2024
Pembimbing


SIGNED

Desiree M. Kipuw, S.T., M.T.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota


SIGNED

Desiree M. Kipuw, S.T., M.T.

Identifikasi Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Sampah 3R di Kabupaten Bekasi

Karlina⁽¹⁾, Desiree Marlyn Kipuw, S.T., M.T.⁽²⁾

⁽¹⁾Karlina Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS B.

⁽²⁾Desiree Marlyn Kipuw, S.T., M.T., Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS B.

Abstrak

Kabupaten Bekasi, dengan penduduk 3,21 juta jiwa dan pertumbuhan 1,64% (2010-2020), menghadapi masalah timbulan sampah mencapai 2.250,35 ton/hari. Pemerintah menciptakan Bank Sampah untuk skala RT/RW dan TPS 3R untuk skala Desa. Pada kenyataannya, tempat pengelolaan sampah 3R tersebut belum maksimal dalam mengurangi sampah karena pengelolaan 3R tidak berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi peran stakeholder dalam pengelolaan 3R sebagai upaya menciptakan pengelolaan sampah 3R yang berkelanjutan di Kabupaten Bekasi. Metode yang digunakan merupakan metode kualitatif dengan metode teknik pengambilan sampel menggunakan snowball sampling. Adapun dalam penentuan wilayah sampel dilakukan menggunakan metode pembobotan data hasil money TPS 3R oleh Bappeda berdasarkan standar aturan dan saran. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan terdapat lebih dari 17 Stakeholder yang memiliki peran dalam pengelolaan sampah yang digolongkan menjadi 6 (enam) aktor (Hexa Helix) meliputi Pemerintah, Swasta, Masyarakat, Akademisi, Media, dan sistem Hukum/Regulasi. Pemerintah sebagai koordinator, swasta sebagai fasilitator, masyarakat sebagai implementer, akademisi dan media sebagai akselerator, dan Hukum/Regulasi sebagai Policy creator. Saat ini, pengelolaan sampah bergantung pada kesediaan Stakeholder, tanpa kewajiban yang jelas, disebabkan oleh lemahnya sistem hukum/regulasi. Diperlukan aturan/regulasi yang mencakup kewenangan, hak, kewajiban, serta pertanggungjawaban dengan sanksi komprehensif dan proporsional dari setiap Stakeholder untuk menjalankan pengelolaan sampah 3R secara optimal dan berkelanjutan.

Kata-kunci : Peran Stakeholder, pengelolaan, 3R.

Pengantar

Tingginya arus Urbanisasi pada wilayah perkotaan berdampak pada peningkatan jumlah penduduk dan barang yang dikonsumsi berakibat pada tingginya timbulan sampah. Kabupaten Bekasi mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan mencapai 3,21 juta jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,64 persen selama periode 2010-2020. Hal tersebut mengakibatkan angka timbulan sampah di Kabupaten Bekasi mencapai 2.250,35 ton per hari. Sebagai upaya mengatasi permasalahan timbulan sampah, dilakukannya pengelolaan sampah 3R oleh Bank Sampah dan Tempat pembuangan sementara (TPS) 3R oleh Pemerintah Daerah dibawah kewenangan Dinas Lingkungan Hidup. Pada kenyataannya, bank sampah dan TPS 3R mengalami kesulitan berkelanjutan dan belum optimal dalam mengurangi timbulan sampah. Hal tersebut tercermin dari kondisi fisik Bank Sampah dan TPS 3R yang seringkali hanya berupa bangunan kosong yang terbengkalai, meskipun secara operasional telah memenuhi standar yang ditetapkan. Salah satu penyebab tidak berkelanjutannya pengelolaan sampah 3R adalah kurang optimalnya peran stakeholder sebagai faktor pendukung dalam operasional Bank Sampah dan TPS 3R di samping pengelolaan.

Menurut UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah wajib berperan dalam pengelolaan sampah. Menurut Tri Kharisma (2013) dalam pengelolaan sampah Lingkungan Permukiman, pemerintah sebagai salah satu Stakeholder memiliki peranan penting dalam pengelolaan sampah, baik sebagai regulator dan service provider. Baik dalam penerbitan Peraturan Daerah (Perda) terkait pengelolaan sampah, rencana strategi, serta program yang

di usulkan dalam pengelolaan sampah mulai dari kegiatan pelayanan dari pengelolaan persampahan, lokasi yang dapat dijangkau pelayanan persampahan, hingga pelaku atau aktor dalam pengelolaan sampah. Dalam pengelolaan sampah yang berbasis 3R, Stakeholder terdiri dari masyarakat penghasil sampah, pihak swasta, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Masing-masing Stakeholder tersebut memiliki peran dalam pengelolaan persampahan (Damhuri dan Padmi, 2010:25) dalam (Puspasari & Mussadun, 2017).

Tri Kharisma (2013) peran stakeholder lainnya seperti membentuk alur koordinasi antar Stakeholder lainnya, pemberdayaan masyarakat sekitar sebagai pengelola dan berkontribusi melalui penyuluhan, penyedia sarana produksi, penyediaan pasar melalui mitra dalam menjual hasil produk Bank Sampah dan TPS 3R yang dihasilkan, dan pengawasan pengelolaan persampahan berkelanjutan. Tenten Tedjaningsih, dkk (2018) mengemukakan apabila peran tersebut belum optimal akan memberikan dampak pada program yang akan terhambat, sedangkan keberhasilan pengelolaan sampah yang baik dianggap sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut sehingga perlunya Identifikasi Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Sampah 3R di Kabupaten Bekasi sebagai upaya menciptakan pengelolaan sampah 3R yang berkelanjutan di Kabupaten Bekasi.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dalam mengidentifikasi stakeholder dan melakukan penilaian peran stakeholder berdasarkan tugas dan fungsi setiap stakeholder yang ada di Kabupaten Bekasi. Kemudian

dilakukan pemetaan stakeholder menggunakan analisis stakeholder untuk melihat pengaruh peran stakeholder yang telah di analisis. Bagian ini juga dapat dijelaskan perspektif yang mendasari pemilihan metode tertentu.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data berdasarkan sumber meliputi pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder di peroleh dari survei instansi, literatur/pustaka penelitian terdahulu, dan survei website resmi. Dilakukan pengambilan sample wilayah studi menggunakan teknik pembobotan pada data sekunder hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) TPS 3R oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi berdasarkan Standar aturan Jurnal Petunjuk Teknis TPS 3R, dan diperoleh hasil sample wilayah studi meliputi Kecamatan Tambun Selatan dengan Kategori maju, Kecamatan Cibitung dengan kategori berkembang, dan Kecamatan Tarumajaya dengan kategori tidak berkembang. Berdasarkan sample TPS 3R dilakukan sample pemilihan Bank Sampah yang mengacu pada standar Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan sampah pada Bank Sampah, dan Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah, serta saran ketua Forum Bank Sampah di masing-masing wilayah Kecamatan sampel.

KOMPONEN STANDAR	TPS 3R	BANK SAMPAH	SAMPLE
Struktur Kelembagaan			Kecamatan Tambun Selatan Kategori Maju
Standar Operasional			
Fasilitas			
Luas Bangunan dan skala pelayanan			Kecamatan Cibitung kategori berkembang
Perlengkapan			
Konstruksi Bangunan			Kecamatan Tarumajaya kategori Tidak Berkembang
Lingkungan			
Kesehatan dan Keselamatan (K3)			

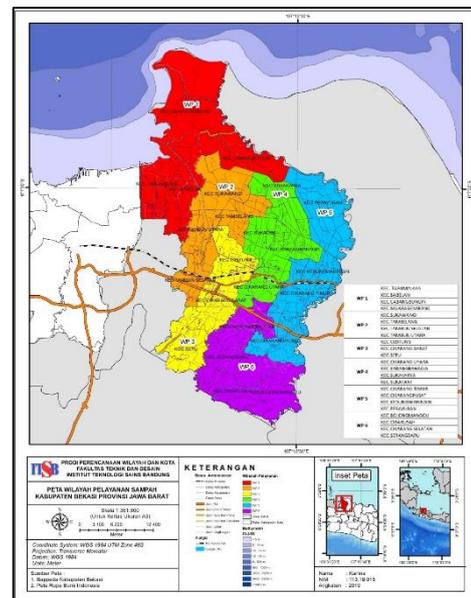
Selanjutnya dalam penentuan metode pengumpulan data Primer dilakukan dengan metode wawancara mendalam (in-depth interview), yaitu teknik wawancara semi struktur atau bebas dalam memperoleh informasi yang mendukung penelitian dengan metode pengambilan data menggunakan metode teknik *snowball sampling*. Snowball sampling merupakan teknik non-probability sampling yang digunakan untuk meneliti populasi atau kelompok yang sulit dijangkau atau jarang ditemukan dengan pengambilan sejumlah sampel kecil yang sudah kenal untuk memberikan referensi atau rekomendasi yang sesuai dengan kriteria penelitian. Proses tersebut terus berlangsung sampai jumlah sampel yang cukup untuk analisis data, dengan arti metode yang digunakan dalam pengambilan data sampai menemukan titik jenuh dalam penelitian ini.

Metode Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan meliputi Analisis deskriptif dalam menjawab sasaran satu sampai empat meliputi identifikasi karakteristik pengelolaan sampah 3R berdasarkan Kategori Maju, berkembang dan Tertinggal; Identifikasi faktor penghambat pengelolaan sampah 3R; Identifikasi peran dan kontribusi setiap Stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan sampah 3R; dan Identifikasi keterlibatan Aktor Helix dalam pengelolaan sampah 3R. Sedangkan untuk sasaran terakhir dilakukan Analisis stakeholder dalam menjawab sasaran Identifikasi pengaruh peran stakeholder terhadap pengelolaan sampah 3R.

Pembahasan

Kabupaten Bekasi Wilayah Pelayanan (WP) persampahan yang dibedakan berdasarkan karakteristik lokasi wilayah. Terdapat 6 (enam) pembagian wilayah pelayanan persampahan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). UPTD Kabupaten Bekasi berada di bawah kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dengan fasilitas penunjang meliputi alat angkut terdiri truck berjumlah 24 buah dan baktor berjumlah 13 buah. Kemudian tenaga kebersihan terdapat kru kebersihan berjumlah 110 orang dan pesapon berjumlah 66 orang setiap UPTD.



Sarana prasarana Persampahan di Kabupaten Bekasi dibawah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup sebagai upaya mengatasi sampah di lingkungan rumah tangga meliputi Bank Sampah dan TPS 3R.

- TPS 3R, terdapat 14 TPS 3R di Kabupaten Bekasi dengan Rencana pengelolaan sampah pada skala Desa. Berdasarkan alur pembangunan TPS 3R dibuat berdasarkan usulan Kelompok Bank Sampah dengan tujuan terciptanya pengelolaan sampah yang berjenjang dengan Bank sampah pada skala RT/RW. Pembangun TPS 3R dibuat berdasarkan kajian SKK Desa Rawan sampah dan Data UPTD Desa yang belum terlayani, dengan sistem manajemen pengelolaan sampah menggunakan sistem bagi hasil untuk gaji karyawan dan biaya operasional TPS 3R.
- Bank Sampah. Terdapat 171 Bank sampah dengan skala pelayanan RT/RW dengan rencana berjenjang dengan TPS 3R. Di Kabupaten Bekasi Kelompok Bank sampah merupakan komunitas peduli lingkungan

berdasarkan inisiatif masyarakat yang mengajukan bantuan ke pemerintah ataupun swasta dalam pengelolaannya. Berdasarkan sistem manajemen pengelolaan sampah pada bank sampah 70% merupakan harga yang di bayarkan kepada masyarakat penabung, dan 30% merupakan insentif bagi pengelola bank sampah yang biasanya memiliki Unit Usaha dalam menggaji karyawan dan biaya operasional Bank Sampah.

Pada Kecamatan sampel penelitian upaya pengurangan sampah meliputi pengurangan sampah dan Penanganan sampah.

1. Kecamatan Tambun Selatan

Kecamatan Tambun Selatan terdiri dari 6 Bank Sampah, meliputi 3 Bank Sampah pada Desa Sumber Jaya, 1 Bank sampah pada Desa Mekarsari, dan 2 Bank Sampah pada Desa Mangun Jaya. Terdapat 1 TPS 3R pada Desa Mekarsari. Berdasarkan upaya daur ulang dan pemanfaatan kembali, pengelolaan sampah 3R di olah menjadi produk Kompos, dan maggot kering di Desa Mangunjaya, sedangkan pada Desa Sumberdaya adanya keterlibatan peran perempuan dalam proses Daur Ulang menjadi kerajinan tas, dompet, dll. Disisi lain, pengelolaan sampah 3R pada Desa Mekarsari tidak mengalami keberlanjutan akibat tidak adanya lembaga pengelola sampah. Partisipasi masyarakat pada Kecamatan Tambun selatan juga dapat dikatakan aktif dalam memilah sampahnya, terutama sampah yang akan di setorkan pada bank sampah. Peran masyarakat yang aktif dalam memilah sampahnya memiliki dampak positif terhadap penanganan sampah.

2. Kecamatan Cibitung

Kecamatan Cibitung memiliki 3 Desa yang sudah mengelola sampahnya dengan metode 3R, meliputi Desa Wanasari, kertamukti dan Desa Wanajaya. Terdapat 36 Bank sampah pada Desa Wanasari, 1 bank sampah pada Desa Kertamukti, dan 1 TPS 3R serta 19 Bank Sampah pada Desa Wanajaya. Pengelolaan sampah 3R pada Bank sampah di Kecamatan Cibitung pada umumnya melibatkan peran perempuan dalam pengelolaan daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah menjadi turunan eco enzyme seperti sabun cuci pakaian, sampo, dll, serta produk daur ulang tas, dompet dll. Terdapat juga pengelolaan maggot kering, dan Kompos dalam pengelolaan sampah Organik. Disisi lain pengelolaan sampah pada TPS 3R di Desa Wanajaya belum sepenuhnya 3R dalam pengolahannya, pengelola TPS 3R masih menggunakan metode pembakaran sampah, terutama sampah organik. Partisipasi masyarakat pada Kecamatan Cibitung juga dapat dikatakan aktif dalam memilah sampahnya, terutama sampah yang akan di setorkan pada bank sampah. Peran masyarakat yang aktif dalam memilah sampahnya memiliki dampak positif terhadap penanganan sampah di Kecamatan Cibitung.

3. Kecamatan Tarumajaya

Kecamatan Tarumajaya memiliki 1 Bank Sampah pada Desa Setiaasih dan 1 TPS 3R pada Desa Pantai Mekar. Pengelolaan sampah pada Bank Sampah di Desa Setiaasih tidak mengalami keberlanjutan semenjak COVID-19. Hal tersebut berdampak pada pengelolaan sampah TPS 3R yang belum dilakukan serah terima akibat tidak

adanya kelompok pengelola sampah pada Kecamatan Tarumajaya.

Selanjutnya, berdasarkan hasil sintesis Aturan/Regulasi yang berlaku, teori, dan Benchmarking dilakukan adaptasi dengan kondisi stakeholder eksisting pengelolaan sampah 3R.



Analisis Faktor Penghambat Pengelolaan Sampah 3R

Analisis faktor penghambat pengelolaan sampah 3R menekankan pada aspek Pengelolaan sampah berkelanjutan menurut Integrated Solid Waste Management (ISWM) meliputi 6 Aspek, diantaranya:

1. Aspek Institusi

Faktor penghambat pada aspek Institusi di Kabupaten Bekasi berkaitan dengan Peraturan Bupati No 53 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah yang memuat peran stakeholder pengelola sampah meliputi Pemerintah, swasta/pelaku usaha, dan masyarakat/komunitas. Dimana saat ini pengelolaan sampah hanya berdasarkan kesediaan stakeholder sehingga pengelolaan sampah bukan merupakan skala prioritas yang harus di atasi oleh setiap stakeholder berdasarkan tugas dan fungsinya.

2. Aspek Politik

Pengelolaan sampah berdasarkan kesediaan stakeholder bukan berdasarkan kewajiban pengelolaan sampah di Lingkungan mengakibatkan tidak adanya hak, kewajiban, kewenangan ataupun tugas dan fungsi stakeholder yang memuat sanksi tegas. Hal tersebut berdampak pada rendahnya peran setiap stakeholder dalam pengelolaan sampah 3R di Kabupaten Bekasi.

3. Aspek Lingkungan

Faktor penghambat pada aspek lingkungan berkaitan dengan pengelolaan sampah yang saat ini belum sepenuhnya 3R. Dimana pengelolaan sampah oleh sektor swasta dan pembuangan akhir ke Badan air banyak mencemari Badan Air di Kabupaten Bekasi mengakibatkan Indeks Kualitas Air (IKA) akibat pencemaran industri tergolong kategori tercemar sedang (dengan angka 38,06). Di sisi lain banyak timbulan sampah dan metode pembakaran yang masih banyak dilakukan juga berdampak pada penurunan Indeks Kualitas Udara dengan kategori sedang. Tingkat pencemaran tersebut tentunya akan semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga perlunya pengelolaan sampah yang optimal dalam mengatasi permasalahan persampahan.

4. Aspek Teknik

Faktor penghambat pada aspek Teknik berkaitan dengan kemampuan teknis dan manajerial serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih dikatakan rendah. Dimana keterampilan masyarakat dalam pengelolaan sampah 3R masih tergolong rendah. Selain itu, penjualan produk hasil pengelolaan sampah 3R yang seharusnya langsung melakukan penjualan ke sektor swasta/pelaku usaha masih melibatkan pihak ketiga (pengepul) yang berdampak pada harga jual yang masih rendah. Di sisi lain, pengelolaan sampah menggunakan teknologi berupa mesin memerlukan biaya operasional yang tinggi.

5. Aspek Finansial dan Ekonomi

Berdasarkan tarif retribusi pengelolaan sampah tidak dapat mencukupi pengelolaan sampah saat ini (Wawancara Dinas Lingkungan Hidup). Tingginya biaya dalam pengelolaan sampah ditambah dengan rendahnya kerjasama antar stakeholder dalam menjual hasil produk sampah 3R merupakan faktor penghambat pengelolaan sampah berdasarkan aspek Finansial dan Ekonomi.

6. Aspek Sosial dan Budaya

Faktor penghambat berdasarkan aspek Sosial dan Budaya berkaitan dengan kurangnya penegakan hukum/sanksi yang berlaku terhadap pencemaran sampah. Di sisi lain tidak adanya bentuk pemilihan lembaga pengelola, pembinaan dan pelatihan, serta sosialisasi secara berkala dalam memastikan pengelolaan sampah 3R berakibat pada rendahnya kesadaran masyarakat dan cenderung menjadi Budaya di masyarakat, terutama untuk pengelolaan sampah dengan metode pembakaran.

Analisis Peran dan Kontribusi Stakeholder

Analisis peran dan Kontribusi di klarifikasikan berdasarkan jenis stakeholder, peran stakeholder dan keberjalanan peran, serta hambatan setiap stakeholder.

Stakeholder Primer	Peranan/ Posisi	Kegiatan Terkait Peran	Keberjalanan Peran		Analisis Penilaian	Hambatan
			Ya	Tidak		
Masyarakat Permukiman	Implementer dan akselerator	• Bertugas dalam membantu mengimplementasikan kebijakan dalam pengelolaan sampah 3R	V		Masih terdapat peran yang kurang optimal dalam melakukan pewadahan dan pemilahan sampah, serta penyebaran informasi sesama masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang menyebarkan pengelolaan sampah 3R di semua wilayah sample, • Tidak adanya bentuk sosialisasi secara menyeluruh berakibat pada masih rendahnya kepedulian masyarakat dalam menyebarkan informasi di sesama kalangan masyarakat lingkungan.
		• Masyarakat permukiman membantu dalam mengurangi sampah dengan cara memakai barang yang bisa digunakan kembali	V			
		• Bertugas menjadi Supplier (Nasabah) dalam pengelolaan sampah 3R	V			
		• Bertugas dalam membantu pewadahan dan pemilahan berdasarkan jenis sampah untuk pengelolaan 3R	V			
		• Masyarakat permukiman membantu dalam menyebarkan Informasi dalam pengelolaan sampah 3R melalui Media	V			
		• Masyarakat ikut membantu dalam menyampaikan terkait masukan dan saran yang membangun terhadap pengelolaan sampah 3R	V			
Tokoh Masyarakat	Akselerator	• Bertugas sebagai mobilisator karena memiliki akses kepada masyarakat	V		Tidak semua tokoh masyarakat bersedia sebagai mobilisator kepada masyarakat sekitar, dan membantu dalam menyebarkan informasi dalam terkait pengelolaan sampah 3R	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya kesadaran tokoh masyarakat dalam menjalankan perannya di pengelolaan sampah 3R
		• Berperan sebagai keteladan dalam pengelolaan sampah 3R sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan meng-educasi	V			
		• Bertugas untuk membantu menyebarkan informasi terkait pengelolaan sampah 3R kepada masyarakat	V			
		• Bertugas dalam memberikan masukan dan saran terkait dengan pengelolaan sampah 3R	V			
Masyarakat Pengelola Informal	Akselerator	• Bertugas dalam melakukan pemungutan sampah di wilayah (memandang	V		Masyarakat informal tidak memilah sampahnya untuk	<ul style="list-style-type: none"> • penjualan sampah bernilai ekonomi oleh masyarakat informal

Stakeholder Primer	Peranan/ Posisi	Kegiatan Terkait Peran	Keberhasilan Peran		Analisis Penilaian	Hambatan
			Ya	Tidak		
		<p>sampah sebagai sektor ekonomi)</p> <ul style="list-style-type: none"> Bertugas dalam membantu pewadahan dan pemilahan berdasarkan jenis sampah untuk pengelolaan 3R 	V		<p>pengelolaan 3R, melainkan hanya melakukan pewadahan terhadap sampah yang bernilai ekonomis</p>	<p>yang lebih besar daripada pengelolaan 3R.</p> <ul style="list-style-type: none"> keterbalikan peran, di mana pengelola sampah 3R menjual ke pengelola informal, bukan sebaliknya, menyulitkan pengolahan industri
		<ul style="list-style-type: none"> Bertugas dalam menjual hasil sampah kepada pengelolaan sampah 3R 		V		
Industri Pengolahan	Akselerator	<ul style="list-style-type: none"> Kemudahan pemasok barang baku (supplier) terhadap perusahaan Perusahaan berpotensi memperoleh profit lebih besar (pengurangan biaya dalam mencari pemasok bahan baku) dan biaya harga beli lebih murah 	V		<p>Tidak semua Industri pengolahan melakukan perannya dalam menjadi konsumen pengelolaan sampah 3R.</p>	<ul style="list-style-type: none"> kurangnya informasi untuk mengajukan kerjasama dengan industri pengolahan keuntungan ekonomi dari pengelolaan sampah 3R terbatas karena skala pengelolaannya masih kecil dibandingkan dengan masyarakat informal.

Stakeholder Kunci (Key)	Peranan/ Posisi	Kegiatan Terkait Peran	Keberhasilan Peran		Analisis Penilaian	Hambatan
			Ya	Tidak		
		<ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab dalam memfasilitasi pengelolaan sampah Daerah Kabupaten Bekasi 	V			
		<ul style="list-style-type: none"> Berperan dalam menerapkan kebijakan teknis pengelolaan persampahan berbasis 3R Kabupaten Bekasi 	V			
		<ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab dalam memastikan penegakan hukum berdasarkan aturan pengelolaan sampah 3R 		V		
		<ul style="list-style-type: none"> Bertugas dalam mewadahi kendala dan saran terkait pengelolaan sampah sebagai bagian dalam penyelenggaraan pelayanan umum 	V		<p>Masih terdapat ketidak-maksimalan peran dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan sampah 3R, terutama dalam memastikan kontribusi setiap peran dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan sampah</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tidak adanya penegakan aturan yang berlaku dalam pengelolaan sampah Tidak adanya bentuk pembinaan dan pelatihan, Bentuk insentif yang masih belum dirasakan masyarakat.
		<ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab dalam keberlanjutan pengelolaan sampah 3R 		V		
		<ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab dalam membina Dinas-Dinas terkait 	V			
		<ul style="list-style-type: none"> Bertugas dalam melakukan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan sampah 3R 		V		
		<ul style="list-style-type: none"> Bertugas dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi pengelolaan sampah 3R 	V			
		<ul style="list-style-type: none"> Bertugas dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan program pengelolaan sampah 3R 	V			
		<ul style="list-style-type: none"> Bertugas dalam menjalin kerjasama dengan sektor swasta dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan sampah 3R 	V			
		<ul style="list-style-type: none"> Bertugas dalam memberikan apresiasi kepada stakeholder yang aktif dalam pengelolaan sampah 3R (baik berupa Insentif dan penghargaan) 		V		
		<ul style="list-style-type: none"> Bertugas dalam memberikan apresiasi kepada stakeholder yang aktif dalam pengelolaan sampah 3R (baik berupa Insentif dan penghargaan) 		V		
Bappeda	Implementer dan fasilitator	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan dana biaya Operasional dan Dana APBD 	V		<p>Tidak adanya bentuk tindak-lanjut setelah dilakukannya Monitoring</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pemantauan penggunaan

Identifikasi Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Sampah 3R

Stakeholder Kunci (Key)	Peranan/ Posisi	Kegiatan Terkait Peran	Keberhasilan Peran		Analisis Penilaian	Hambatan
			Ya	Tidak		
		<ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab terhadap Dana APBD yang dikeluarkan Bertanggung jawab dalam Monitoring dan Evaluasi berdasarkan pendanaan yang di keluarkan 	V		dan Evaluasi berdasarkan dana yang dikeluarkan	pendanaan dalam pengelolaan sampah 3R, terutama dalam pembinaan dan pelatihan yang harusnya dilakukan.
DPMD	Implementer	<ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab dalam pembinaan dan pelatihan masyarakat Bertugas dalam mengkoordinasi dinas dan stakeholder terkait dengan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat Bertanggung jawab dalam kemajuan Badan Usaha Milik Desa (yang dapat mendukung pemasaran produk pengelolaan sampah 3R) 	V	V	DPMD berperan koordinatif dengan dinas terkait untuk pembinaan program. Meskipun melibatkan akademisi dalam pengelolaan sampah berwawasan lingkungan, pembinaan dan pelatihan untuk Masyarakat pengelola sampah 3R di Bank Sampah dan TPS 3R di wilayah studi belum pernah dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> kurangnya inisiatif Pemerintah dalam pembinaan dan pelatihan merata untuk pengelola sampah, Tidak adanya pemantauan keberlanjutan setelah pelatihan, dan kurangnya penegakan peraturan untuk meningkatkan penjualan produk lokal, termasuk produk pengelolaan sampah 3R di Kabupaten Bekasi.
CSR Perusahaan	Fasilitator	<ul style="list-style-type: none"> Bertugas dalam memfasilitasi kegiatan pengelolaan sampah 3R Bertugas dalam memberikan modal usaha dan bantuan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah 3R Bertugas dalam berkoordinasi untuk melakukan pembinaan dan pelatihan dengan <i>stakeholder</i> lainnya 	V	V	CSR Perusahaan berperan efektif dengan menyediakan fasilitas, modal usaha, serta melakukan pembinaan dan pelatihan untuk mendukung pengelolaan sampah 3R. Kerja sama dengan akademisi juga terjalin untuk pengembangan riset dalam pengelolaan sampah berwawasan lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> kurang peduli terhadap pengelolaan sampah, memberikan bantuan hanya kepada pengelola yang eksis, sehingga tidak mendukung secara optimal keberlanjutan pengelolaan sampah 3R.
Pengelola Bank Sampah	Implementer	<ul style="list-style-type: none"> Bertugas dalam mengurangi sampah di skala RT/RW, termasuk mengelola sampah menjadi produk ekonomi Membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah 3R Bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan nasabah sebagai supplier Bank Sampah Bertugas dalam mencatat jenis dan jumlah sampah masuk dari Nasabah Bank Sampah (masyarakat) Bertugas dalam menjual dan memasarkan hasil produk Bank Sampah Bertugas dalam menampung aspirasi rembuk warga terkait pengelolaan sampah skala RT/RW Ikut serta dalam memberikan masukan dan saran terkait dengan pengelolaan sampah 3R 	V	V	Pengelola Bank Sampah efektif dalam mengurangi sampah skala RT/RW dengan melakukan edukasi, menjual produk 3R melalui bazar secara rutin, dan aktif berpartisipasi dalam forum serta pertemuan dengan Dinas terkait untuk menyampaikan keluhan, kritik, dan saran terkait pengelolaan sampah 3R.	<ul style="list-style-type: none"> Tidak banyak pengelolaan sampah organik Beberapa forum Bank Sampah juga belum memiliki pemasaran yang tetap.
Pengelola TPS 3R	Implementer	<ul style="list-style-type: none"> Bertugas dalam mengelola dan mengurangi sampah TPS 3R pada skala Desa Membantu dalam meningkatkan kesadaran 	V	V	Pengelolaan sampah oleh TPS 3R belum sepenuhnya 3R , dimana pada lokasi sample masih	<ul style="list-style-type: none"> kurangnya dukungan stakeholder untuk pelayanan TPS 3R di satu Desa, dan koordinasi yang

Stakeholder Kunci (Key)	Peranan/ Posisi	Kegiatan Terkait Peran	Keberhasilan Peran		Analisis Penilaian	Hambatan
			Ya	Tidak		
		masyarakat terkait pengelolaan sampah 3R <ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan nasabah (<i>supplier</i>) TPS 3R Bertugas membuat Rencana Kerja Masyarakat, dengan menerima masukan dan saran yang diterima dari <i>stakeholder</i> lainnya. Ikut serta dalam memberikan masukan dan saran terkait dengan pengelolaan sampah 3R Bertugas dalam menampung aspirasi rembuk warga terkait pengelolaan sampah Desa Menyusun Rencana Pendanaan operasional, pemeliharaan dan rencana penggunaannya. Bertugas dalam membuat laporan kinerja pelaksana per-6 bulan (satu semester) 	V	V	dilakukannya metode pembakaran dalam mengelola sampah.	kurang optimal antar stakeholder, pengelolaan yang tidak berjenjang dengan Bank Sampah di tingkat RT/RW, Biaya operasional yang tinggi, kesulitan penjualan produk TPS 3R, dan dampaknya terhadap pengelolaan yang belum berwawasan lingkungan juga menjadi tantangan.
		<ul style="list-style-type: none"> Bertugas dalam pengambilan kebijakan pengelolaan sampah 3R Bertugas dalam memberikan masukan dan saran yang membangun dalam pengelolaan sampah 3R Bertugas membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat (mempertimbangkan gaya hidup seseorang) Bertugas sebagai pemantauan tindakan oleh badan usaha dan pemerintah 	V	V		

Stakeholder Sekunder	Peranan/ Posisi	Kegiatan Terkait Peran	Keberhasilan Peran		Analisis Penilaian	Hambatan
			Ya	Tidak		
Pemerintah Desa	Implementer dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah pada skala Desa 	V		Pemerintah Desa berperan koordinatif dengan stakeholder untuk kegiatan pengelolaan sampah 3R. Pemerintah Desa juga terlibat dalam penyediaan lahan dan penggolongan individu dalam pengelolaan sampah 3R.	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya insentif akibat lemahnya rasa tanggung jawab dan inisiatif dalam pengelolaan sampah Desa. kurangnya dukungan anggaran rutin tahunan dan kurangnya transparansi dalam pengajuan anggaran, juga menjadi kendala.
		<ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab dalam memberikan fasilitas pengelolaan sampah 		V		
		<ul style="list-style-type: none"> Bertugas dalam koordinasi dengan <i>stakeholder</i> lainnya 	V			
		<ul style="list-style-type: none"> Bertugas dalam menyiapkan dan menggolongkan individu dalam pengelolaan sampah 3R 	V			
Pemerintah Kecamatan	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di wilayah kecamatan 	V		Pemerintah Kecamatan berperan koordinatif dengan stakeholder, memberikan dukungan dengan menyediakan wadah	<ul style="list-style-type: none"> kurangnya pemantauan dan kejelasan prosedur pengajuan fasilitas dalam pengelolaan sampah 3R di wilayah.
		<ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab dalam koordinasi dengan <i>stakeholder</i> lainnya terkait pengelolaan sampah 3R 	V			

Stakeholder Sekunder	Peranan/ Posisi	Kegiatan Terkait Peran	Keberhasilan Peran		Analisis Penilaian	Hambatan
			Ya	Tidak		
		<ul style="list-style-type: none"> Bertugas dalam memfasilitasi kegiatan pengelolaan sampah Bertugas dalam memberikan masukan dan saran terkait dengan pengelolaan sampah 3R kepada Pemerintah Daerah 	V	V	aspirasi masyarakat pengelola sampah 3R. Mereka juga menampung kebutuhan pengelolaan sampah untuk diajukan dalam anggaran tahunan pemerintah kecamatan.	<ul style="list-style-type: none"> Banyak pengelola sampah 3R tidak mengetahui cara berkoordinasi akibat kurangnya inisiatif dari Pemerintah Kecamatan terhadap pengelolaan sampah 3R wilayah.
Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan)	Koordinator dan implementer	<ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab dalam pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program terkait kawasan perumahan, permukiman dan pertanahan 	V	V	Disperkimtan berperan dalam menyusun program di wilayah, melakukan monitoring-evaluasi, serta mendukung pengembangan wilayah terkait peningkatan sumberdaya alam dan manusia. Dalam pengelolaan sampah 3R, Disperkimtan berkolaborasi dengan pemerintah Desa untuk menentukan lokasi dan perizinan pembangunan.	<ul style="list-style-type: none"> kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait pembangunan tempat pengelolaan sampah kepada masyarakat.
		<ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab dalam pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 	V	V		
		<ul style="list-style-type: none"> Bertugas mendukung penataan dan pengembangan wilayah, serta kepastian hukum terkait penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan 	V	V		
		<ul style="list-style-type: none"> Bertugas dalam meningkatkan sumberdaya alam dan sumber daya manusia dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan 	V	V		
Pemerintah Kecamatan	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di wilayah kecamatan 	V	V	Pemerintah Kecamatan berperan koordinatif dengan stakeholder, memberikan dukungan dengan menyediakan wadah aspirasi masyarakat pengelola sampah 3R. Mereka juga menampung kebutuhan pengelolaan sampah untuk diajukan dalam anggaran tahunan pemerintah kecamatan.	<ul style="list-style-type: none"> kurangnya pemantauan dan kejelasan prosedur pengajuan fasilitas dalam pengelolaan sampah 3R di wilayah. Banyak pengelola sampah 3R tidak mengetahui cara berkoordinasi akibat kurangnya inisiatif dari Pemerintah Kecamatan terhadap pengelolaan sampah 3R wilayah.
		<ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab dalam koordinasi dengan <i>stakeholder</i> lainnya terkait pengelolaan sampah 3R 	V	V		
		<ul style="list-style-type: none"> Bertugas dalam memfasilitasi kegiatan pengelolaan sampah 	V	V		
		<ul style="list-style-type: none"> Bertugas dalam memberikan masukan dan saran terkait dengan pengelolaan sampah 3R kepada Pemerintah Daerah 	V	V		
Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan)	Koordinator dan implementer	<ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab dalam pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program terkait kawasan perumahan, permukiman dan pertanahan 	V	V	Disperkimtan berperan dalam menyusun program di wilayah, melakukan monitoring-evaluasi, serta mendukung pengembangan wilayah terkait peningkatan sumberdaya alam dan manusia. Dalam pengelolaan sampah 3R, Disperkimtan berkolaborasi dengan pemerintah Desa untuk	<ul style="list-style-type: none"> kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait pembangunan tempat pengelolaan sampah kepada masyarakat.
		<ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab dalam pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 	V	V		
		<ul style="list-style-type: none"> Bertugas mendukung penataan dan pengembangan wilayah, serta kepastian hukum terkait penyelenggaraan perumahan, 	V	V		

Stakeholder Sekunder	Peranan/ Posisi	Kegiatan Terkait Peran	Keberhasilan Peran		Analisis Penilaian	Hambatan
			Ya	Tidak		
		kawasan permukiman dan pertanahan <ul style="list-style-type: none"> Bertugas dalam meningkatkan sumberdaya alam dan sumber daya manusia dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan Bertugas menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya 	V	V	menentukan lokasi dan perizinan pembangunan.	
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR)	Implementer	<ul style="list-style-type: none"> Berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan, penataan dan Lingkungan Bertanggung jawab dalam mengatur, mengembangkan, dan memelihara infrastruktur dan ruang publik Memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah terkait dengan bidang pekerja umum dan penataan ruang. 	V	V	DCKTR berperan dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur publik, dan memberikan bimbingan teknis dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, termasuk pembangunan tempat pengelolaan sampah 3R.	<ul style="list-style-type: none"> kurangnya pemeliharaan fasilitas infrastruktur publik, ketidapkahaman masyarakat terhadap alur pengajuan dan pemeliharaan infrastruktur, khususnya pengelolaan sampah.
Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfo)	Akselerator	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Komunikasi, Informatika dan Statistik Pelaksanaan administrasi dinas dan Pembinaan dibidang Komunikasi, Informatika dan Statistik Bertugas dalam menyebarkan informasi pengelolaan sampah 3R, sebagai upaya promosi dan pemasaran Bertugas meliput pemberitaan pengelolaan sampah 3R 	V	V	Diskominfo berperan dalam monitoring dan evaluasi tahunan, menyebarkan informasi terkait pengelolaan sampah 3R melalui promosi dalam pemberitaan wilayah, dan berkolaborasi dengan media pemberitaan nasional.	<ul style="list-style-type: none"> kurangnya kerjasama dengan stakeholder seperti akademisi dan komunitas/influencer media dalam riset pengembangan di bidang komunikasi, informasi, dan statistik untuk promosi pengelolaan 3R.

Selanjutnya dilakukan peran dan kontribusi Aktor helix yang termasuk ke jenis stakeholder kunci. Aktor Helix-Multi aktor dianggap penting karena dapat meningkatkan kualitas, efektifitas dan penyelenggaraan pengelolaan sampah 3R

karena bersifat kolaboratif. Keterlibatan multi aktor juga dianggap dapat mendorong transparansi, partisipasi, dan pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah (Fitria, 2022).

Stakeholder Kunci (Key)	Peranan/Posisi	Kegiatan Terkait Peran	Keberhasilan Peran		Analisis Penilaian	Hambatan
			Ya	Tidak		
Akademisi	Akselerator dan Fasilitator	<ul style="list-style-type: none"> Bertugas dalam mengembangkan riset terkait dengan produk pengelolaan sampah 3R Berkoordinasi dalam pengembangan teknologi dengan stakeholder lainnya. 	V	V	Akademisi melakukan perannya dalam pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya kerjasama akademisi dengan pengelola sampah dalam pengembangan riset Belum ada akademisi yang concern terhadap pengembangan riset

Stakeholder Kunci (Key)	Peranan/Posisi	Kegiatan Terkait Peran	Keberhasilan Peran		Analisis Penilaian	Hambatan
			Ya	Tidak		
		<ul style="list-style-type: none"> Bertugas dalam pembinaan dan pelatihan pengelolaan sampah 3R yang berwawasan lingkungan. 	V		dalam pengelolaan sampah berdasarkan Jurnal Teknis.	<ul style="list-style-type: none"> pengelolaan sampah di Kab. Bekasi Kurangnya kejelasan prosedur pengajuan kerjasama dan kurangnya inisiatif dari sebagian akademisi turut menjadi kendala.
Media	Akselerator	<ul style="list-style-type: none"> Bertugas dalam penyebaran informasi pengelolaan sampah 3R Bertanggung jawab sebagai media promosi pengelolaan sampah 3R berwawasan lingkungan Berkoordinasi dengan stakeholder lainnya dalam penyebaran informasi 	V	V	Penyebaran informasi melalui media, terutama melalui platform seperti Instagram, X, dan Facebook, belum optimal untuk mempromosikan pengelolaan sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> kurang kerjasama dengan stakeholder lainnya seperti komunitas/individual yang aktif di media/memiliki kepedulian terhadap pengelolaan sampah berwawasan lingkungan sebagai upaya dari promosi pengelolaan 3R.
Hukum/Regulasi	Policy Creator	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai dasar Pembagian kewenangan, hak, dan kewajiban antara unsur Pemerintah-Swasta-Masyarakat dan Multi-Aktor lainnya Memuat sanksi pelanggaran pidana terhadap pengelolaan sampah 	V	V	Hukum/Regulasi melakukan perannya dalam pembagian kewenangan yang memuat unsur Pemerintah-swasta-masyarakat dalam pengelolaan sampah.	<ul style="list-style-type: none"> kurangnya penjelasan mengenai kewenangan, hak, dan kewajiban yang termasuk sanksi dalam regulasi pengelolaan sampah 3R. Kurangnya kewajiban dan insentif sesuai peraturan berdampak pada kurang optimal nya peran setiap stakeholder dalam pengelolaan sampah. Sanksi hanya mengacu pada UU No 18 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah.

Analisis Pengaruh Peran

Analisis pengaruh peran dilakukan menggunakan pemetaan yang mengadaptasi teori pemetaan stakeholder menurut Mitchell et al (1997), turner (2008), dan Brysson dalam Hardiansyah (2012:190). Mitchell et al (1997) melakukan penilaian berdasarkan Kekuatan (*power* (P)) merupakan kemampuan menjalankan program, Legitimasi (*legitimated* (L)) merupakan pengakuan sosial berdasarkan sistem norma/hukum, dan Kepentingan (*urgency* (U)). Kemudian di klarifikasikan menjadi 7 Typology stakeholder.

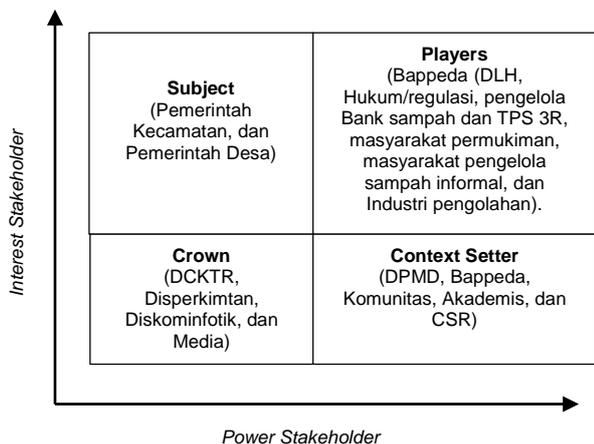
No	Stakeholder Typology	Stakeholder Attributes			Kategori	Stakeholder
		P	L	U		
						Desa CSR perusahaan
6	Dependent					- Pengelola TPS 3R - Pengelola Bank Sampah, masyarakat permukiman
7	Definitive				Definitive (1)	• DLH, dan Regulasi/Hukum

No	Stakeholder Typology	Stakeholder Attributes			Kategori	Stakeholder
		P	L	U		
1	Dormant					• Bappeda, Diskominfo
2	Discretionary				Latent (3)	• CKTR, Disperkimtan, Industri Pengolahan
3	Demanding					• Pemerintah Kecamatan Masyarakat informal,
4	Dominant				Expectant (2)	• DPMD, Komunitas, Akademisi, Media
5	Dangerous					• Pemerintah

Turner (2008) mengklasifikasikan penilaian berdasarkan 1) Aware/ Opposition (Sadar/oposisi) merupakan stakeholder yang memerlukan pengelolaan, 2) Aware/Support (Sadar/Dukungan) merupakan stakeholder yang layak mendapatkan informasi guna mendukung program pengelolaan, 3) Ignorant/ Opposition (Tidak Peduli/Oposisi) merupakan stakeholder yang memerlukan peningkatan pemahaman, 4) Ignorant/ Support (Tidak Peduli/Dukungan) merupakan stakeholder yang aktif mendukung program pengelolaan sampah 3R.



Brysson dalam Hardiansyah (2012:190) mengklasifikasikan stakeholder menjadi 4 meliputi 1) Context Setter (Pendukung) merupakan stakeholder dengan pengaruh tinggi dan sedikit kepentingan, 2) Players merupakan stakeholder dengan pengaruh dan kepentingan tinggi, 3) Subject merupakan stakeholder dengan kepentingan tinggi dan pengaruh kecil, 4) Crowd (Pengikut) merupakan stakeholder dengan kepentingan dan pengaruh yang kecil.



Selanjutnya dilakukan pemetaan berdasarkan keberadaan peran Stakeholder di wilayah sample studi meliputi Kecamatan Tambun Selatan (TS), Kecamatan Cibitung (CBT), dan Kecamatan Tarumajaya (TJ).

Kategori	Stakeholder	Wilayah Studi		
		TS	CBT	TJ
Pemerintah	Dinas Lingkungan Hidup	V	V	V
	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	V	V	V
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-

Kategori	Stakeholder	Wilayah Studi		
		TS	CBT	TJ
	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	V	V	V
	Dinas Perumahan Permukiman, dan Pertanahan	V	V	V
	Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik	V	V	-
	Pemerintah Kecamatan	V	V	V
	Pemerintah Desa	V	V	-
Swasta	Industri Pengolahan	V	-	-
	CSR Perusahaan	V	V	-
Masyarakat	Pengelola TPS 3R	-	V	-
	Pengelola Bank Sampah	V	V	-
	Komunitas	V	V	-
	Masyarakat Permukiman	V	V	-
	Tokoh Masyarakat	V	V	-
	Masyarakat Informal	V	V	-
Media	Bekasikab.go.id, Dailybekasi.com, Jabarprov.go.id, Kabarpublik.id, www.timenews.co.id, Metro.sindonews.com, www.dakta.com, Lampungmerah.id, Koranpelita.co	V	V	-
Akademisi	Universitas Trisakti	-	-	-
	Presiden University	-	V	-
	Universitas Pelita Bangsa	-	V	-
Hukum/Regulasi	UU No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah	V	V	V
	PP No 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	V	V	V
	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan (LHK) No 14 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah	V	V	V
	Peraturan Menteri No 13 Tahun 2012 tentang Pedoman pelaksanaan 3R melalui Bank Sampah	V	V	V
	Jurnal Teknis Tempat Pengelolaan Sementara (TPS) 3R	V	V	V
	Peraturan Bupati No 53 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah	V	V	V

Peran stakeholder yang tidak berjalan disebabkan oleh tidak adanya peran tidak adanya pembinaan dan pelatihan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) ataupun karena pengelolaan sampah pada wilayah sample studi tidak mengalami berkelanjutan.

Setelah dilakukan pemetaan keberadaan peran Stakeholder di wilayah sample penelitian, kemudian dilakukan sistem Adaptasi pengelolaan sampah 3R berdasarkan metode pengelolaan sampah yang memuat keterlibatan peran Stakeholder di setiap Kecamatan sample dengan tujuan adanya sistem pembelajaran dari setiap Kecamatan sample yang dapat di adaptasi di setiap Kecamatan di Kabupaten Bekasi dan mendukung pengelolaan sampah 3R yang berkelanjutan.

Kecamatan	Keterlibatan Peran Stakeholder Nama	Adaptasi
Kecamatan Tambun Selatan	Swasta 1. Industri Pengolahan 2. CSR Perusahaan	• Terdapat peran Industri pengolahan yang bermitra dengan pengelola sampah • CSR Perusahaan memberikan bantuan fasilitas, modal, dan pembinaan kepada Bank Sampah di binaan, seperti Astra Group, Yutaka Manufacturing, dan Global Keramik.

	Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunitas Maggot dan Bank Sampah 2. Tokoh Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat Komunitas Maggot yang lebih banyak di Kecamatan Tambun Selatan • Terdapat Tokoh masyarakat selain RT/RW, seperti pemuka Agama yang rutin mengingatkan untuk menabung sampah/menyetorkan sampahnya ke Bank Sampah
		Akademisi	<ul style="list-style-type: none"> • Akademisi pada Kecamatan Tambun membantu dalam pelatihan dan pembinaan, serta sosialisasi. Di sisi lain, ada juga bentuk bantuan infrastruktur yang diberikan (termasuk teknologi).
Kecamatan Cibitung	Swasta	<ol style="list-style-type: none"> 1. CSR Perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat Perusahaan melalui CSR-nya melakukan pembangunan Fasilitas pengelolaan sampah 3R yaitu TPS 3R oleh Hyundai Group.
	Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunitas P2WKSS 2. Komunitas Peduli Lingkungan (Kopel) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada Komunitas P2WKSS (Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera) yang memberikan pembinaan dan pelatihan untuk memberdayakan peran perempuan dalam mengelola sampah bernilai ekonomi. • Komunitas Kopel merupakan komunitas yang melibatkan Generasi muda dalam pengelolaan sampah, dimana generasi muda di Kecamatan Cibitung yang tergabung dalam Komunitas Kopel berhasil membuat Konversi BBM menggunakan metode teknik pyrolysis.
		Akademisi	<ul style="list-style-type: none"> • Berkolaborasi dengan Hyundai Group, akademisi terlibat dalam riset pengelolaan sampah dengan teknologi pemilah, pencacah, pembuat paving blok, dll. Pembinaan juga dilakukan terkait Rencana Kerja Masyarakat dan laporan rutin, menjadikan pengelolaan sampah 3R di Kecamatan Cibitung lebih sistematis.
Kecamatan Tarumajaya	-	-	-

Kesimpulan

Berdasarkan Identifikasi Peran Stakeholder dalam pengelolaan sampah 3R di Kabupaten Bekasi, terdapat lebih dari 17 (tujuh belas) Stakeholder yang digolongkan menjadi 6 (enam) aktor meliputi Pemerintah, Swasta, Masyarakat, Akademisi, Media, dan sistem Hukum/Regulasi. Adapun berdasarkan peran dalam pengelolaan sampah 3R, pemerintah memiliki peran utama sebagai koordinator, swasta memiliki peran utama sebagai fasilitator, masyarakat memiliki peran utama sebagai implementer, akademisi dan media memiliki peran sebagai akselerator, dan sistem Hukum/Regulasi memiliki peran utama sebagai Policy creator yang mengikat peran setiap Stakeholder. Berdasarkan sistem hukum/regulasi pengelolaan sampah 3R mengacu pada Peraturan Bupati No 53 tahun 2017 tentang Pengelolaan sampah, dimana pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi, khususnya upaya pengurangan sampah pada lingkup rumah tangga dan pengelolaan sampah dengan metode 3R di Kabupaten Bekasi hanya berdasarkan kesediaan setiap Stakeholder, bukan berdasarkan kewajiban setiap Stakeholder dalam pengelolaan sampah yang mereka hasilkan. Lemahnya sistem Hukum/Regulasi yang mengatur terkait peran Stakeholder dalam pengelolaan sampah 3R mengakibatkan peran setiap Stakeholder dalam pengelolaan sampah 3R belum berjalan secara maksimal yang berdampak pada tidak berkelanjutan-nya Pengelolaan sampah 3R yang di Kabupaten Bekasi.

Tinjauan Pustaka

Bryson, J. M. (2004). (PDF) *What to Do When Stakeholders Matter: A Guide to Stakeholder Identification and Analysis Techniques*. Retrieved January 18, 2024, from https://www.researchgate.net/publication/200465469_What_to_Do_When_Stakeholders_Matter

Creswell, J. W. *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed Edisi Keempat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mitchell, R. K., Agle, B. R. & Wood, D. J. (1997). Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts. *The Academy of Management Review*, 22(4), 853–886. Retrieved January 16, 2024, from <https://www.jstor.org/stable/259247>

Puspasari, G. & Mussadun, M. (2017). Peran Kelembagaan Dalam Pengelolaan Persampahan Di Kabupaten Trenggalek. *JURNAL PEMBANGUNAN WILAYAH & KOTA*, 12, 385.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tedjaningsih, T., Suyudi, S. & Nuryaman, H. (2018). PERAN KELEMBAGAAN DALAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS MENDONG. *MIMBAR AGRIBISNIS: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 4, 210.